

Evaluasi Dampak Program BILAPERDU (Program Mobil Pelayanan Terpadu) di Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi

Gilang Mahendhra¹, Supranoto², Hadi Makmur³
gilangmahendhra@gmail.com

Abstrak

Program BILAPERDU (mobil layanan pertanian terpadu) adalah sebuah kebijakan dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu tentang pelayanan langsung dari Dinas Pertanian di bidang pertanian di Kabupaten Banyuwangi dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kualitas produk pertanian. Program BILAPERDU terdapat dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Mobil Pelayanan Pertanian Terpadu. Program BILAPERDU ini memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan langsung kepada petani atau kelompok tani di dalam bidang pertanian. Dalam program ini program BILAPERDU di tujukan untuk memudahkan petani dalam melakukan pekerjaannya karena di dalamnya berisi tentang bagaimana petani dapat melakukan diskusi dengan dinas pertanian ataupun petugas terkait mengenai tanaman tanpa harus bertemu secara langsung dan juga pada saat para petani tidak bisa melakukan penanganan sendiri petugas dari dinas pertanian akan turun tangan dengan cara panggilan langsung ke Dinas pertanian dengan menggunakan aplikasi ini.

Kata Kunci: evaluasi, program, pelayanan

Abstract

The BILAPERDU (integrated agricultural service vehicle) program is a policy from the Banyuwangi Regency government, namely regarding direct services from the Agriculture Service in the agricultural sector in Banyuwangi Regency in order to increase the productivity and quality of agricultural products. The BILAPERDU program is contained in Banyuwangi Regent Regulation Number 50 of 2017 concerning Integrated Agricultural Service Cars. The BILAPERDU program aims to provide direct services to farmers or farmer groups in the agricultural sector. In this program, the BILAPERDU program is aimed at making it easier for farmers to carry out their work because it contains information about how farmers can hold discussions with the agricultural service or related officers regarding crops without having to meet in person and also when farmers cannot handle it themselves, officers from the service Agriculture will intervene by calling directly to the Department of Agriculture using this application.

Keywords: evaluation, program, service

^{1,2,3} Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

1. Pendahuluan

Penelitian ini bermaksud mengevaluasi program BILAPERDU di Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Evaluasi merupakan tahap terakhir dalam proses kebijakan publik. Evaluasi dilakukan setelah suatu kebijakan dilaksanakan dengan tujuan yang telah disahkan. Program berarti tentang rancangan mengenai asas dan usaha yang akan dilakukan. Program BILAPERDU (mobil layanan pertanian terpadu) adalah sebuah kebijakan dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu tentang pelayanan langsung dari Dinas Pertanian di bidang pertanian di Kabupaten Banyuwangi dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kualitas produk pertanian.

Program BILAPERDU terdapat dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Mobil Pelayanan Pertanian Terpadu. Program BILAPERDU ini memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan langsung kepada petani atau kelompok tani di dalam bidang pertanian. Pembangunan sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan dari tahun ke tahun terus ditingkatkan untuk dapat memelihara keberlanjutan swasembada pangan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperbaiki keadaan gizi melalui penganekaragaman jenis bahan pangan. Pengembangan sub sektor tanaman pangan mempunyai arti yang strategis, meliputi sumber kebutuhan pokok kehidupan nasional terutama bahan pangan yang menopang kehidupan lebih dari 60% pelaku usaha pertanian di Indonesia. Berdasarkan perspektif ekonomi, sub sektor tanaman pangan masih memberikan sumbangan yang nyata terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yakni terdiri dari penyerapan tenaga kerja di pedesaan, peningkatan pendapatan pertanian, dan penyumbang devisa (Badan Pusat Statistik, 2015).

Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi terus mengembangkan BILAPERDU agar bisa berevolusi menjadi layanan penyuluhan masa depan dengan mengadopsi model layanan “*ojek online*” yaitu menjadikan penyuluh di BPP sebagai *Unit Quick Respon* dan petani sebagai *Costumer*. Dengan demikian kinerja penyuluh dan kecepatan penanganan masalah dapat terukur dengan baik serta sebagai bahan evaluasi untuk terus berinovasi terhadap peningkatan layanan publik bidang pertanian.

Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 50 tahun 2017 tentang Program Mobil Pelayanan Pertanian Terpadu yang nantinya guna memberikan pelayanan secara langsung kepada petani ataupun kelompok tani di bidang pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perternakan di Kabupaten Banyuwangi dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kualitas produk pertanian. Dalam program ini program BILAPERDU di tujukan untuk memudahkan petani dalam melakukan perkerjaannya karena di dalamnya berisi tentang bagaimana petani dapat melakukan diskusi dengan dinas pertanian ataupun petugas terkait mengenai tananaman tanpa harus bertemu secara langsung dan juga pada saat para petani tidak bisa melakukan penanganan sendiri petugas dari dinas pertanian akan turun tangan dengan cara panggilan langsung ke Dinas pertanian dengan menggunakan aplikasi ini.

Desa Sumbergondo dengan wilayah persawahan dan hutan yang cukup luas menjadikan mata pencaharian penduduk di Desa Sumbergondo ini sebagian besar adalah petani. Penduduk di Desa Sumbergondo yang memiliki mata pencaharian sebagai petani Sebagian besar hanya menggunakan pengalamannya untuk menanggulangi permasalahan permasalahan di sawah. Dengan adanya program BILAPERDU para petani dimudahkan konsultasi tentang pertanian langsung dengan

Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi.

Permasalahan program BILAPERDU yang terjadi di Desa Sumbergondo adalah penurunan kontribusi sektor pertanian yang cukup besar disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah iklim, alih fungsi lahan pertanian di pedesaan, keterbatasan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia yang rendah, kurangnya minat pemuda dalam pertanian, dan faktor lainnya (Insani,dkk,2018).

Dari sebagian hal yang dijelaskan tersebut sebagai suatu hal yang menarik peneliti untuk mendeskripsikan Evaluasi dampak dari program BILAPERDU agar dapat diketahui kinerja dari sebuah kebijakan dari Program BILAPERDU yang di jalankan pemerintah daerah tersebut. Dari hasil penelitian ini juga dapat memberikan saran berupa solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun para petani untuk mempertahankan lahan pertanian di kabupaten Banyuwangi untuk menumbuhkan variasi-variasi pertanian baru seperti tujuan yang di harapkan oleh pemerintah sebelum adanya kebijakan alih fungsi lahan.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik atau dalam Bahasa Inggris disebut *public policy* adalah salah satu bagian dari dimensi keilmuan dan praktik administrasi negara atau administrasi publik. Menurut Waldo (1971:17) Administrasi publik adalah organisasi dan manajemen manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Sedangkan menurut Pffifner dan Presthus dikutip dalam Syafiie (2003:31) Administrasi publik dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari hari pemerintah.

Bentuk Kebijakan Publik

- a. Berupa aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat (regulasi). Golongan yang termasuk bentuk ini yakni Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden. Sebagai acuan yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat, kebijakan dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai pada suatu waktu.
- b. Distribusi atau alokasi sumber daya. Kebijakan ini bermula pada tindakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah yang umumnya tidak dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan secara umum. Kebijakan ini ditujukan untuk mengimbangi berbagai kesenjangan antar golongan dan daerah dalam satu negara.
- c. Redistribusi atau realokasi. Kebijakan ini merupakan usaha untuk memperbaiki kepincangan sebagai akibat dari kesalahan kebijakan distribusi sebelumnya. Sasarannya ada pada pemerintah ekonomi dalam masyarakat. Untuk itu maka kegiatan ekonomi golongan maju sedikit lebih dibebani untuk memberikan fasilitas bagi yang lemah.
- d. Pembekalan atau pemberdayaan. Pembekalan atau pemberdayaan ini dimaksudkan untuk memodali atau memunculkan potensi masyarakat dengan tujuan untuk pemerataan, namun lebih ditekankan pada pemerataan kemampuan, untuk kemudian dapat berkembang sendiri.

- e. Etika. Etika merupakan aturan-aturan berdasarkan kaidah yang berlaku baik yang berupa aturan mengenai agama maupun adat yang dapat dijadikan pedoman dalam berbagai tindakan aparatur publik.

Evaluasi Dampak Program

Menurut Dunn (2003:596) dampak kebijakan (*policy impact*) adalah perubahan actual dalam perilaku atau sikap yang merupakan akibat dari keluaran kebijakan. Menurut Islamy (1988:615) dampak kebijakan merupakan akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakan kebijakan kebijakan tersebut. Sedangkan menurut pendapat Rossi dalam Widodo (2012:120) berpendapat bahwa evaluasi dampak bertujuan untuk menguji efektifitas suatu kebijakan/proyek dalam pencapaian tujuan kebijakan dengan dua pertanyaan sebagai berikut, yaitu apakah kebijakan/proyek menyebabkan perubahan sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, apakah perubahan tadi merupakan perubahan yang signifikan? Pengukuran dampak kebijakan merupakan bagian dari evaluasi kebijakan, dimana menurut Winarno (2007: 241) mengatakan evaluasi kebijakan atau sering disebut sebagai analisis kebijakan, yakni suatu pengukuran terhadap dampak kebijakan atau sesuatu yang lain, mencakup pembuatan pertimbangan-pertimbangan mengenai manfaat kebijakan. Kegiatan evaluasi pada sebuah kebijakan atau program, akan dapat dinilai apakah dampak yang diharapkan dari kebijakan/program sudah tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta dapat dilihat seberapa besar manfaat yang diterima oleh target grup.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2005:21), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan berbagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Menurut Edward (Winarno 2012:177) studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat dan dalam dalam hal mengurangi masalah tidak bisa, maka kebijakan itu kemungkinan mengalami kegagalan walaupun dalam pengimplementasiannya dilakukan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik kemungkinan juga akan mengalami kegagalan, jika dalam mengimplementasikannya kurang baik yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan.

Edwards dalam Winarno (2012:177) menjelaskan bahwa terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, Empat faktor yang dikemukakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Komunikasi: Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/ atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat.
2. Sumber Daya: Perintah-perintah implementasi diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksana mengalami kekurangan sumber-sumber yang

diperlukan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini cenderung tidak efektif.

3. Kecenderungan: Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang memiliki konsekuensi-konsekuensi penting dalam implementasi kebijakan yang efektif.
4. Struktur birokrasi: Yang dimaksud dengan struktur birokrasi adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan.

Rekomendasi Kebijakan Publik

Dunn (2003:133) menyatakan rekomendasi adalah prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi mengenai konsekuensi yang mungkin dari serangkaian arah tindakan di masa yang akan datang dan nilai – nilai atau manfaat dari kebijakan tersebut. Kriteria untuk rekomendasi kebijakan menurut Dunn (2003:429) dimaksudkan secara eksplisit sebagai nilai-nilai yang dinyatakan yang melandasi rekomendasi untuk kebijakan selanjutnya. Dunn mengemukakan beberapa kriteria rekomendasi kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan. Kriteria rekomendasi kebijakan terdiri dari enam tipe utama yaitu, efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan kelayakan.

Berdasarkan penjelasan diatas rekomendasi kebijakan dapat menghasilkan alternatif kebijakan yang akan berisi informasi konsekuensi konsekuensi di masa depan yang akan ditimbulkan oleh suatu kebijakan. Untuk membuat rekomendasi kita harus menentukan alternatif mana yang paling baik. Sehingga hal ini menyebabkan perlunya adanya rekomendasi kebijakan yang kelak akan dijadikan alternatif-alternatif pengambilan kebijakan, yang dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan kebijakan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang.

Konsep Pelayanan Pertanian

Menurut Albercht dalam Lovelock, 1992 (dalam Sedarmayanti 2010:243) pelayanan adalah suatu pendekatan organisasi total yang menjadi kualitas pelayanan yang diterima pengguna jasa, sebagai kekuatan penggerak utama dalam pengoperasian bisnis. Selanjutnya Monir (dalam Harbani Pasolong 2013: 128), mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Gronroos (dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih 2013:2) pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau 11 hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan. Menurut Mubyarto (1995), pertanian dalam arti luas mencakup pertanian rakyat atau pertanian dalam arti sempit disebut perkebunan (termasuk didalamnya perkebunan rakyat dan perkebunan besar), kehutanan, peternakan, dan perikanan (dalam perikanan dikenal pembagian lebih lanjut yaitu perikanan darat dan perikanan laut). Indonesia masih merupakan negara pertanian, artinya pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari

produk nasional yang berasal dari pertanian. Kerisauan umat manusia mengenai ketersediaan bahan pangan dan ledakan jumlah penduduk dunia serta ketersediaan sumberdaya alam yang terbatas melahirkan ajaran Malthusianisme dan Neomalthusianisme serta tumbuhnya kesadaran pada pelestarian fungsi lingkungan dan sumberdaya alam sehingga melahirkan pemikiran baru pembangunan berwawasan lingkungan dan konsep pembangunan berkelanjutan (Herry, 2006).

Terpadu berasal dari kata dasar padu. Terpadu memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga terpadu dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. (dalam kbki.web.id yang diakses pada 1 juni 2020).

2. Metodologi

Sesuai dengan permasalahan dan uraian latar belakang, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Definisi penelitian menurut Moleong (2004:6) adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) (dalam Moleong (2016:4)) penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pelapor penelitian (Moleong, 2016:168). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor, memaparkan dan mengetahui “Evaluasi dampak Program BILAPERDU di Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi”.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi peneliti sehingga terhindar dan tidak terjebak dalam pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Menurut Idrus (2009:42) dari fokus penelitian, peneliti akan menurunkan serangkaian pertanyaan penelitian yang akan ditelitinya. Fokus penelitian sangat penting dijadikan sarana untuk memadu dan mengarahkan jalannya penelitian, berpedoman kepada fokus penelitian, sehingga peneliti mengetahui dengan pasti data mana yang akan diambil. Fokus dalam penelitian ini adalah evaluasi dampak BILAPERDU Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi.

Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengukuran data dilakukan secara *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi peserta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*). Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Uji Keabsahan Data

Maka berdasarkan penjelasan tersebut, dalam rangka menguji keabsahan data peneliti menerapkan teknik uji kredibilitas dengan teknik triangulasi sumber, dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yaitu menguji keabsahan data berdasarkan informasi yang sama dari beberapa sumber yang berbeda. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan informasi dari teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Analisis Data

Teknik penyajian data menurut Usman dan Akbar (2009:85) merupakan kegiatan penyajian data dalam bentuk matriks, *network*, *chart* atau grafik dan sebagainya dalam usaha untuk memberikan sajian singkat dan menarik terkait data namun tetap dapat memberikan gambaran keseluruhan data tersebut. Sedangkan analisis data merupakan upaya penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Secara umum teknik analisis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Penggolongan teknis analisis data ini dilakukan berdasarkan data yang menjadi bahan analisis dalam penelitian. Memperhatikan definisi analisis data diatas, penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dengan jenis data yang digunakan yaitu statistik inferensial.

3. Hasil dan Diskusi

Program Mobil Pelayanan Pertanian Terpadu (Bilaperdu) merupakan salah satu program dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanian. Program Bilaperdu sudah ada sejak tahun 2017 melalui landasan Peraturan Bupati Banyuwangi No 50 Tahun 2017 tentang Program Mobil Pelayanan Pertanian Terpadu. Tujuan Program Bilaperdu berdasarkan Pasal 2 peraturan tersebut yaitu memberikan pelayanan langsung kepada petani / kelompok tani di bidang pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan di kabupaten, dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kualitas produk pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Sasaran Program BILAPERDU berdasarkan peraturan Bupati Banyuwangi No 50 th 2017 adalah meliputi petani/kelompok tani di bidang pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di kabupaten. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Gapoktan “Untuk program Bilaperdu sendiri, bisa diakses semua mas, dari petani, walaupun penggarap atau pemiliknya tetap bisa laporan ke Gapoktan” (A. Mujadid, komunikasi personal, 31 Mei 2023). Penyuluh Lapangan Pertanian Kabupaten Banyuwangi, Bapak Septian Indra juga menyampaikan bahwa setiap petani dapat mengakses program Bilaperdu. Sehingga berdasarkan data terkait peraturan bupati dan observasi lapang, bahwa sasaran dari program Bilaperdu meliputi petani maupun kelompok tani dan bisa diakses oleh pemilik lahan maupun petani penggarap di lapangan.

Efektifitas

Pendekatan efektifitas merupakan analisa yang diperlukan dalam mengkaji sebuah kebijakan, hal tersebut berkaitan dengan pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan kebijakan. Pada program Bilaperdu, tujuan utamanya sesuai

dengan Pasal 2 Peraturan Bupati Banyuwangi No 50 th 2017 yaitu memberikan pelayanan langsung kepada petani / kelompok tani di bidang pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan di kabupaten, dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kualitas produk pertanian, perkebunan, dan peternakan. Berdasarkan pelaksanaan program yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, penerapan Bilaperdu sudah efektif mencapai tujuan yang telah disusun, yaitu memberikan pelayanan langsung kepada petani atau kelompok tani melalui adanya petugas penyuluh lapang yang setiap hari melakukan kunjungan ke lapang, sehingga ketika ada masalah terkait pertanian dan peternakan, Dinas Pertanian melalui PPL dapat membantu secara langsung dan cepat untuk mengatasi masalah pertanian tersebut. Hal tersebut dijelaskan juga oleh beberapa petani Desa Sumber Gondo *“PPL itu dari dinas gitu kalau ada masalah ya langsung terjun melihat, lalu dikasih solusi, terus penanganannya ya dari kita sendiri, setelahnya ada Bilaperdu ini ya jadi lebih mudah cari solusi”* (Mulyono, komunikasi personal, 20 Mei 2023). Petani lain juga menyampaikan hal serupa *“Kalau ada permasalahan itu sangat membantu, PPL sendiri sering turun ke lahan. Biasanya itu kalau contohnya ada serangan wereng gitu dari PPL itu kayak promo awalnya ada penyemprotan masal gitu”* (Arifin, komunikasi personal, 20 Mei 2023). Berdasarkan penjelasan tersebut, penerapan program Bilaperdu di Desa Sumbergondo sudah efektif dalam pemberian layanan secara langsung kepada petani maupun kelompok tani terkait permasalahan dalam pertanian dan peternakan.

Selain itu, Program Bilaperdu juga bertujuan untuk meningkatkan hasil produktivitas pertanian. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui informan penelitian, program Bilaperdu di Desa Sumbergondo mampu meningkatkan produktivitas dan hasil pertanian petani setempat, hal tersebut juga dikarenakan menurunnya biaya perawatan tanaman sehingga meningkatkan pendapatan petani. Peningkatan hasil pertanian dan biaya perawatan tanaman tersebut disampaikan oleh petani Desa Sumbergondo *“Dulu itu sebelum adanya Bilaperdu ini, Saya sekali panen paling dapat 4 kilo, kalau sekarang sekali panen itu minimal 6 kilo”* (Arifin, komunikasi personal, 20 Mei 2023). Petani lain juga menyampaikan *“Untuk pertanian disini ya sekarang semakin meningkat, pendapatannya juga meningkat, perbandingannya juga lumayan mas, dilihat aja rumah-rumah petani disini sekarang jadi lebih bagus-bagus”* (Mulyono, komunikasi personal, 20 Mei 2023). Terkait penurunan biaya perawatan dan strategi untuk meningkatkan produktivitas dijelaskan bahwa *“Kalau sekarang itu jadi tau mas, penggunaan bibit yang umurnya pas itu bisa hasil panennya lebih banyak, kalau dulu itu biaya sama hasilnya itu hampir setara. Kalau sekarang biayanyaitu jadi berkurang mas, jadi nanti pendapatannya itu makin banyak meningkat naik gitu”* (Bandi, komunikasi personal, 20 Mei 2023). Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, penerapan program Bilaperdu sudah efektif dalam pemberian layanan dalam bidang pertanian di Desa Sumbergondo, dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui pemberian pengetahuan serta strategi dalam rangka meningkatkan hasil pertanian.

Efisiensi

Berdasarkan kriteria efisiensi, penerapan program Bilaperdu di Desa Sumbergondo mempertimbangkan nilai efisiensi dengan melakukan perhitungan biaya, waktu, dan tenaga dalam pelaksanaan program. Diantaranya yaitu meminimalkan biaya untuk memberikan fasilitas yang tepat sasaran untuk

mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya melalui penggunaan *drone* dalam melakukan penyemprotan pestisida untuk menghindari hama wereng. Dikarenakan untuk pembasmian hama wereng harus dilakukan secara serempak agar hama dapat diatasi secara tepat. Kepala Gapoktan Sumbergondo menjelaskan *“makanya ada juga dilakukan penyemprotan menggunakan drone secara serempak agar lebih hemat, lebih cepat, dan efisien. Untuk drone ini ya fasilitasnya dari dinas ada, dari swasta juga melalui pengajuan proposal pengaadaan gitu, kan memang dana nya pengadaanya cukup besar”* (A. Mujadid, komunikasi personal, 20 Mei 2023).

Selain itu, terkait efisiensi biaya juga dirasakan oleh petani terkait pengelolaan pertaniannya. Program Bilaperdu memberikan manfaat melalui pengetahuan terkait penggunaan bibit yang tepat umur untuk menghasilkan hasil panen yang banyak, selain penggunaan bibit yang tepat waktu biaya pemeliharaan dan perawatan tanah dan tanaman juga lebih hemat dikarenakan banyaknya subsidi pestisida dari dinas pertanian serta pengetahuan mengenai pemanfaatan pestisida organik yang dapat dibuat melalui bahan-bahan organik agar dapat menurunkan biaya operasional yang dikeluarkan petani untuk memelihara tanah dan tanamannya. Dengan adanya penekanan biaya tersebut dan pendapatan yang meningkat, maka secara langsung prinsip efisiensi menjadi pertimbangan yang penting dalam pelaksanaan program Bilaperdu di Desa Sumbergondo. Penjelasan mengenai penekanan biaya panen tersebut disampaikan oleh petani Desa Sumbergondo *“Kalau sekarang itu jadi tau mas, penggunaan bibit yang umurnya pas itu bisa hasil panennya lebih banyak, kalau dulu itu biaya sama hasilnya itu hampir setara. Kalau sekarang biaya nya itu jadi berkurang mas, jadi nanti pendapatannya itu makin banyak meningkat naik gitu”* (Bandi, komunikasi personal, 20 Mei 2023).

Kecukupan

Nilai kecukupan dalam konsep evaluasi kebijakan yaitu menilai apakah efektifitas yang dicapai dapat memuaskan kebutuhan dan harapan Masyarakat. Berdasarkan beberapa penjelasan yang diperoleh peneliti di lapangan, bahwa pelaksanaan program Bilaperdu cukup memuaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam hal ini terutama petani, karena sasaran dari program ini adalah petani dan peternak. Sejak adanya program Bilaperdu, para petani di Desa Sumbergondo lebih mudah dalam mencari informasi serta mencari solusi atas permasalahan yang dialami di lahan pertanian. Selain itu, pengetahuan yang memadai juga diperlukan untuk menambah wawasan petani dalam rangka meningkatkan hasil panen dan menekan biaya yang digunakan dalam pertanian. *“Sering ada sosialisasi, bantuan dari dinas, bantuan bibit, VOC sering gitu, masalah obat-obatan kadang petani dapat, kadang juga dari permintaan petani”* (Arifin, komunikasi personal, 20 Mei 2023).

Pemerataan Kebijakan Program

Bila perlu merupakan sebuah program yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk memberikan pelayanan terkait konsultasi pertanian dan peternakan kepada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, khususnya kepada petani dan peternak. Terkait pemerataan kebijakan, program Bilaperdu sudah melakukan pemerataan dengan menerapkan program di seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu pemerataan juga dilakukan terkait akses

terhadap program Bilaperdu kepada golongan petani. Program Bilaperdu dapat diakses baik oleh petani penggarap, maupun pemilik lahan. Sehingga pengetahuan dan pelayanan pertanian yang diberikan melalui program Bilaperdu dapat merata di kalangan petani. Hal tersebut dijelaskan oleh Ketua Gapoktan "*Untuk program Bilaperdu sendiri, bisa diakses semua mas, dari petani, walaupun penggarap atau pemiliknya tetap bisa laporan ke Gapoktan*" (A. Mujadid, komunikasi personal, 31 Mei 2023). Berdasarkan penjelasan tersebut, program Bilaperdu memenuhi kriteria pemerataan, baik pemerataan wilayah, maupun sasaran program.

Responsivitas

Responsivitas merupakan penilaian terkait seberapa jauh kebijakan dapat memenuhi kebutuhan kelompok dan golongan masyarakat tertentu. Pada Program Bilaperdu ini, kelompok yang menjadi sasaran program yaitu petani dan peternak. Terkait pelaksanaan program, efektivitas, dan efisiensi program yang telah dilakukan telah memenuhi kebutuhan kelompok. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan, para petani yang menjadi informan penelitian peneliti, menjelaskan bahwa program Bilaperdu sudah sangat responsif dalam memenuhi kebutuhan para petani. Kebutuhan tersebut diantaranya yaitu kebutuhan terkait informasi mengenai pemeliharaan tanaman, serta pemecahan masalah atas solusi pertanian. Para petani menjelaskan bahwa program Bilaperdu sangat membantu terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Karena beberapa cara dan kemudahan yang diperoleh atas adanya program tersebut. Ketika ada masalah-masalah yang dialami petani terhadap tanaman maupun lahan pertaniannya, Petugas Penyuluh Lapangan langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang ada di lapangan. Setelah dianalisis, PPL memberikansolusikepada petani serta memberikan pestisida serta obat-obatan untuk tanaman tersebut. Selain itu komunikasi juga dilakukan dua arah, karena dari PPL setiap hari melakukan kunjungan keliling ke lahan pertanian untuk memantau pelaksanaan pertanian di Desa Sumbergondo. Maka dari itu unsur responsivitas sudah memenuhi kriteria dikarenakan hal ini sudah dapat memenuhi kebutuhan petani terkait pengetahuan serta solusi untuk masalah pertanian.

Ketepatan

Ketepatan merupakan indikator penilaian terhadap program dan kesesuaian program terhadap kebutuhan masyarakat. Pada program Bilaperdu dan pelaksanaannya sudah cukup relevan untuk memenuhi kebutuhan petani. Petani menyampaikan bahwa sebelum adanya program Bilaperdu, para petani memiliki beberapa masalah pertanian namun untuk solusi yang dijalankan, hanya menggunakan teori-teori orang lama, artinya solusi terkait masalah pertanian hanya dilakukan berdasarkan pengalaman, tidak ada pengetahuan ilmu sains pasti yang dapat diakses oleh para petani. Maka dari itu sejak adanya program Bilaperdu, masyarakat terutama para petani mendapatkan informasi dan pengetahuan dari para profesional terkait masalah-masalah pertanian, sehingga untuk masalah-masalah pertanian dapat diatasi secara efektif. Selain itu masalah terkait pengeluaran biaya operasional pertanian yang cukup tinggi karena tingginya harga pupuk, obat-obatan pertanian maupun pestisida pertanian. Maka dari itu dengan adanya Bilaperdu ini, terdapat beberapa bantuan terkait pestisida dan obat-obatan serta pemberian pengetahuan mengenai penggunaan pestisida alami untuk menekan biaya perawatan

pertanian agar hasil yang didapat semakin banyak. Hal tersebut disampaikan oleh petani Desa Sumebrgondo “*Sebelum adanya Bilaperdu ya dulu pas ada masalah ya kita cari-cari solusi sendiri, tanya ke teman, obat- obatannya ya sendiri, dari tetangga. Kalau setelahnya ada Bilaperdu ya jadi lebih mudah cari informasi terkait penanggulangannya itu, kan adda yang fasilitasi, lebih cepat juga, jadi banyak tempat sharing lah*” (Mulyono, komunikasi personal, 20 Mei 2023).

Dampak Implementasi Program Bilaperdu Berdasarkan konsep dampak kebijakan yang telah dijelaskan pada Bab 2 penelitian ini, terdapat beberapa dimensi mengenai dampak kebijakan menurut Anderson (dalam Islamy, 2000:115) yang dapat dianalisis pada kebijakan Program Bilaperdu di Desa Sumbergondo, Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut.

1. Dampak kebijakan yang diharapkan. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Mobil Pelayanan Pertanian Terpadu. Program BILAPERDU ini memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan langsung kepada petani atau kelompok tani di dalam bidang pertanian. Pada peraturan tersebut pula menjelaskan bahwa pelayanan program BILAPERDU meliputi beberapa hal yaitu pengendalian organisme pengganggu tanaman, pelayanan di bidang kesehatan tanah, pelayanan uji tanah, pelayanan teknologi pertanian dan peternakan, pelayanan dalam penggunaan alat dan mesin pertanian, serta konsultasi teknis di bidang pertanian dan peternakan. Pelayanan yang diberikan tersebut dalam rangka mempermudah petani dalam mengatasi masalah pertanian untuk mendapatkan hasil produktivitas pertanian yang meningkat. Sehingga melalui adanya kebijakan Program Bilaperdu, pemerintah mengharapkan agar pelayanan kepada petani lebih mudah untuk mengatasi masalah-masalah pertanian yang terjadi. Jika masalah pertanian yang terjadi dapat diatasi dengan baik, maka akan meningkatkan produktivitas lahan pertanian sesuai harapan para petani. Penerapan Bilaperdu di Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi sudah sesuai dengan dampak kebijakan yang diharapkan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan dibentuknya kebijakan tersebut, yaitu mempermudah pelayanan kepada petani terkait konsultasi serta solusi masalah pertanian. Pelayanan tersebut dapat diakses 24 jam serta akan mendapatkan solusi langsung dari dinas pertanian melalui program penyuluh lapang yang setiap hari melakukan kunjungan dan kontrol terhadap masalah-masalah pertanian yang terjadi di lahan.

2. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok

Dampak kebijakan Program Bilaperdu di Desa Sumbergondo, Kabupaten Banyuwangi bukan hanya dirasakan oleh petani maupun masyarakat desa Sumbergondo saja, melainkan oleh masyarakat lain selaku konsumen serta distributor bahan pangan. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan produksi yang cukup banyak akibat peningkatan produktivitas pertanian, yang membuat ketersediaan beras di pasar cukup dan tidak ada kelangkaan pangan. Melalui adanya ketersediaan padi maupun beras yang cukup di lingkungan masyarakat, maka tidak akan menyebabkan kenaikan harga pangan yang signifikan akibat kelangkaan bahan pangan. Pemerintah juga ikut merasakan dampak akibat adanya Bilaperdu ini, dikarenakan ketersediaan bahan pangan di masyarakat yang cukup dan melimpah sehingga tidak ada masalah-masalah yang terjadi akibat kelangkaan bahan pangan. Selain itu, dampak kebijakan Bilaperdu terhadap

situasi atau kelompok juga dirasakan saat implementasi program Bilaperdu kepada petani di Desa Sumbergondo, yaitu dampak dirasakan oleh kelompok petani di Desa Sumbergondo melalui mudahnya akses informasi dan pengetahuan terkait masalah-masalah yang terjadi selama masa tanam, selain itu mudahnya akses terkait alat-alat atau teknologi yang dibutuhkan dalam menunjang proses masa tanam dan perawatan tanaman.

3. Dampak kebijakan berpengaruh pada kondisi sekarang atau akan datang

Dampak dari program Bilaperdu tersebut dapat dirasakan baik secara langsung maupun akan datang. Dampak secara langsung yaitu pada petani yang dapat mengakses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten mengenai konsultasi serta pemberian solusi akibat masalah pertanian dengan sangat mudah dan cepat. Hal tersebut dikarenakan pelayanan dari Bilaperdu dilakukan setiap hari melalui monitor keliling wilayah pertanian oleh petugas penyuluh lapang, selain itu program tersebut juga dapat diakses secara daring dengan menghubungi petugas pelayanan penyuluh pertanian terkait konsultasi masalah pertanian dalam waktu 24 jam, dan petugas akan langsung melakukan kunjungan atau pemantauan lahan yang bermasalah langsung saat jam operasional untuk mengatasi masalah pertanian yang terjadi. Dampak yang akan datang juga dapat dirasakan oleh petani, yaitu dengan menambah pengetahuan masing-masing petani terkait penyelesaian masalah-masalah pertanian berdasarkan keilmuan yang diberikan oleh penyuluh setiap terjadi masalah. Sehingga para petani tidak hanya mengandalkan pengalaman atau kepercayaan zaman dahulu, melainkan memperoleh pengetahuan yang didasari oleh keilmuan terkait masalah-masalah pertanian yang ada. Selain itu dampak yang akan datang juga dapat dirasakan oleh masyarakat umum terkait adanya ketersediaan bahan pangan yang cukup sehingga membuat masyarakat lebih mudah dalam mencari bahan pokok, mengingat beras adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Dengan adanya ketersediaan beras yang cukup, maka akan memberikan dampak yaitu harga bahan pokok yang stabil. Berikut data hasil produktivitas lahan pertanian padi di Desa Sumbergondo sebelum adanya program Bilaperdu, hingga setelah adanya program Bilaperdu yang diperoleh dari data desa yang diolah.

Tabel 1. Produktivitas Lahan

Tahun	Luas Lahan (ha)	Produktivitas lahan (ton/ha)
2015	304,85	0,65
2016	304,85	0,63
2017	304,80	0,77
2018	304,78	0,75
2019	304,77	0,87
2020	304,77	1,12
2021	304,771	1,18
2022	304,77	1,2

Dampak kebijakan terhadap biaya tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah, yaitu melalui ketersediaan pangan yang cukup maka akan mengakibatkan kestabilan harga pangan di lingkungan masyarakat. Kelangkaan bahan pangan tidak akan terjadi yang akan mengakibatkan naiknya harga pangan secara signifikan. Kestabilan harga pangan juga akan mengurangi biaya pemerintah terkait subsidi bahan pangan yang biasanya dilakukan akibat kenaikan harga pangan yang signifikan.

Berdasarkan data hasil produktivitas lahan padi tersebut, sejak adanya program Bilaperdu produktivitas lahan pertanian semakin meningkat setiap tahunnya, hal tersebut dikarenakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui program Bilaperdu dalam mempermudah pelayanan konsultasi pertanian, terutama untuk mengatasi masalah-masalah pertanian.

4. Dampak kebijakan terhadap biaya langsung

Dampak kebijakan terhadap biaya langsung dirasakan oleh petani Desa Sumbergondo berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan pada subbab sebelumnya, bahwa dengan adanya program Bila perdu tersebut, petani mendapatkan hasil pertanian yang cukup banyak dengan biaya yang rendah, hal tersebut dikarenakan adanya pengurangan biaya perawatan hama serta biaya penggunaan pupuk anorganik. Biaya perawatan dapat ditekan karena petugas pada program Bilaperdu, terdapat pelayanan pemberian obat-obatan untuk mengatasi hama pertanian. Selain itu juga pengurangan biaya untuk pupuk pertanian karena dari petugas penyuluh lapang memberikan informasi serta pengetahuan terkait penggunaan pupuk yang ramah lingkungan dan dapat dibuat sendiri oleh petani.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan Program Bilaperdu di Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta memberikan dampak positif pada masyarakat. Program Bilaperdu di Desa Sumbergondo dilaksanakan melalui program pelayanan yang diberikan oleh Petugas Penyuluh Lapang (PPL) yang berasal dari Dinas Pertanian, PPL memberikan pelayanan langsung ke petani untuk mengatasi masalah-masalah pertanian secara langsung dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait masalah-masalah dan keilmuan dalam pertanian. Evaluasi Program Bilaperdu di Desa Sumbergondo memenuhi 6 kriteria evaluasi kebijakan yang disampaikan oleh Dunn (2003) yaitu kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan kebijakan, responsivitas, serta ketepatan. Keenam kriteria tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Efektivitas. Penerapan program Bilaperdu sudah efektif dalam pemeberian layanan dalam bidang pertanian di Desa Sumbergondo, dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui pemberian pengetahuan serta strategi dalam rangkameningkatkan hasil pertanian.
2. Efisiensi. Dengan adanya penekanan biaya dalam perawatan serta biaya tanam dan pendapatan yang meningkat, maka secara langsung prinsip efisiensi menjadi pertimbangan yang penting dalam pelaksanaan program Bilaperdu di Desa Sumebgondo.
3. Kecukupan. Sejak adanya program Bilaperdu, para petani di Desa Sumbergondo lebih mudah dalam mencari informasi serta mencari solusi atas permasalahan yang dialami di lahan pertanian. Hal tersebut cukup memenuhi harapan masyarakat atau petani terkait adanya program Bilaperdu dalam memberikan pelayanan bagi petani dan peternak.
4. Pemerataan Kebijakan. Terkait pemerataan kebijakan, program Bilaperdu sudah melakukan pemerataan dengan menerapkan program di seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu pemerataan juga dilakukan terkait

- akses terhadap program Bilapedu kepada golongan petani.
5. Responsivitas. Program Bilaperdu sudah sangat responsif dalam memenuhi kebutuhan para petani. Kebutuhan tersebut diantaranya yaitu kebutuhan terkait informasi mengenai pemeliharaan tanaman, serta pemecahan masalah atas solusi pertanian.
 6. Ketepatan. Pada program Bilaperdu dan pelaksanaannya sudah cukup relevan untuk memenuhi kebutuhan petani diantaranya kebutuhan terkait pengetahuan serta solusi-solusi atas masalah pertanian, serta pemberian pupuk serta obat-obatan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Daftar Pustaka

- Abidin,S.Z. 2012. *Kebijakan publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Humanika.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Akbar, P.S. dan H.Usman. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ananda, R., & Rafida, T. 2017. *Pengantar evaluasi program pendidikan*. CV. Puskra Mitra Jaya.
- Dunn, W. N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Idrus, M. 2009. *Metode penelitian ilmu sosial*. Edisi 2. Jakarta: Erlangga.
- Anggara, S. 2014. *Kebijakan publik*.
- Islamy, M. I. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, Y. T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori,dan Isu*, Edisi Kedua. *Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Thoha, M. 2008. *Ilmu administrasi publik kontemporer*. Edisi 1, cetakan 1. Jakarta: Kencana.
- Milles, M. B., & Huberman, A. M. 1992. *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, L. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Anggito, A., & Setiawan, J. 2018. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Suwitri, S. 2008. *Konsep dasar kebijakan publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Silalahi,U.2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif DAN R&D*. Cetakan ke14. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- SD, H. S. 2000. *Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya.
- Syafiie, I. K. 2011. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Thoha, M. 2017. *Ilmu administrasi publik kontemporer*. Kencana.

- Waldo, D. 1971. *Pengantar Studi Public Administration*. Jakarta: Tjemerlang.
- Widodo, J. 2021. *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Budi, W. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Mulyadi, D. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2017. Program Mobil Pelayanan.

